

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH OLEH PEMILIK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN YANG SAH
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/PN.BDG**

TESIS

Oleh:

HEPPY WAJONGKERE, SH

2302190039



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH OLEH PEMILIK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN YANG SAH
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/PN.BDG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

HEPPY WAJONGKERE, SH

2302190039



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan :

Nama : Heppy wajongkere, SH
NIM : 2302190039
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

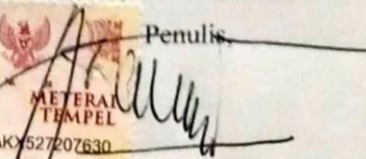
Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugasakhir yang berjudul : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Tanah Oleh Pemilik Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggunaan Tanah Tanpa Hak Atau Izin Yang Sah”**

(Studi Kasus : Putusan Nomor. 21/Pid.CR/2019/ Pn.Bdg) adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir ini.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapat gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas akhir.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batral.

Jakarta, 1 November 2025

Penulis

METERAN TEMPEL
VZB64AKY527207630
Heppy Wajongkere, SH.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH
OLEH PEMILIK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN
YANG SAH**

(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/PN.BDG)

Oleh :

Nama : Heppy Wajongkere, SH

NIM : 2302190039

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 November 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Aartje Tehupeoiry, S.H., M.H.
NIDN: 981456/0314086404

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NUPTK: 5434757658137090

Ketua Program Studi

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130140

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NUPTK: 5434757658137090



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Heppy Wajongkere
NIM : 2302190039
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH OLEH PEMILIK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN YANG SAH (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/PN.BDG)** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H, M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L	Sebagai Anggota	

Jakarta, 03 Februari 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan :

Nama : Heppy Wajongkere, SH
NIM : 2302190039
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Tanah Oleh Pemilik Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggunaan Tanah Tanpa Hak Atau Izin Yang Sah** (Studi Kasus : Putusan Nomor 21/Pid.Cr/2019/Pn.Bdg)

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 1 November 2025

Penulis,

Heppy Wajongkere, SH.

KATA PENGANTAR

Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu, berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH OLEH PEMILIK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN YANG SAH”**(STUDIKASUS: PUTUSAN NOMOR 21/PID.CR/2019/Pn..Bdg)

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan tesis ini berkat bimbingan dan arahan para pembimbing, sehingga penulis menyampaikan rasa terima kasih yang disampaikan kepada yang terhormat **Prof.Dr. Aartje Tehupeioiry, S.H., M.H.**, sebagai Dosen Pembimbing I, dan kepada yang terhormat **Dr. Hendri Jayadi,S.H.,M.H.** sebagai Dosen Pembimbing 2, yang telah memberikan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya Tesis ini.

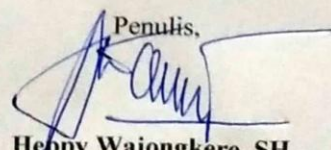
Demikian juga penulis menghaturkan rasa terima kasih dan memberikan penghargaan setingginya kepada Guru Besar, Dosen, dan Staf Akademis Universitas KristenIndonesia (UKI), yaitu :

1. **Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn.**Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. **Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,MBA.**, Rektor Universitas KristenIndonesia (UKI).

3. **Dr. Hendri Jayadi, S.H.,M.H.**, Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. **Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.**, Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. **Prof. Dr. Aartje Tehupeioiry, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hendri Jayadi, S.H.,M.H.** sebagai Dosen Pembimbing I dan II pada Penelitian Tesis dan sebagai Penguji, yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berharga untuk dapat terselesaikannya Tesis ini.
6. **Dr.Drs. Tatok Sudjiarto,S.H.,M.H.,M.T.L** sebagai anggota tim Penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang Penulis
8. tidak sebuatkan satu demi satu.
9. Penulis juga ingin menyampaikan secara khusus rasa terima kasih kepada keluarga besar penulis terutama kepada isteri tercinta Shelviana Lesmanasari dan Elisha Prince Imanuel Wajongkere anak penulis.

Penulis tentunya sangat sadar bahwa Tesis ini jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis tetap menaruh asa kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis dan praktisi di bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 3 Februari 2026

Penulis,

Heppy Wajongkere, SH.

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji.....	iv
Halaman Pernyataan Publikasi.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian	16
D. Kerangka Teori dan Konsep	16
1. Kerangka Teori	16
a). Teori Penegakan Hukum.....	16
b). Teori Pidana	18
2. Kerangka Konsep	27
E. Metode Penelitian	31

1. Spesifikasi Peneliti	31
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Data	32
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Teknik Analisis Data	33
6. Lokasi Penelitian	34
7. Originalitas Penelitian	34
F. Sistematika Penulisan	36
 Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penegakan Hukum	39
B. Teori Pidana	41
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin oleh Yang Berhak atau Kuasanya	44
D. Reformasi Hukum Agraria	60
E. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pidana	69
F. KUHP Undang-Undang No.1/2023	80
G. KUHP Undang-Undang No.20/2025	81
 BAB III : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN TANAH OLEH PEMILIK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK ATAU IZIN YANG SAH	
A. Penegakan Hukum	

1. Pengertian Penegakan Hukum	83
2. Penegakan Hukum Pidana.....	86
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...	87
B. Pengertian Tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960..	89
C. Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.....	92
D. Undang- Undang No 5 Tahun 1960 mengatur Tentang Hak Menguasai Tanah Oleh Negara dan Hak Milik Perseorangan...	99
E. Otoritas Negara Dalam Penguasaan Hak Atas Tanah.....	106
F. Dasar Hak Untuk Kepemilikan Perorangan Atas Tanah	112
G. Perbuatan Penguasaan/Menguasai	115
H. Kasus Posisi Putusan Nomor 21/PID.CR/2019/PN.BDG	119

BAB IV: UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI TANAH DALAM TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

A. Penegakan dan penerapan hukum Pasal 6 ayat (1) Perpu No. 51 Tahun 1960 mengenai larangan memakai tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya terbukti lebih efektif dalam menangani kasus penyerobotan tanah.....	127
B. Pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan No.21/Pid.CR/2019/PN.Bdg Indramayu menurut	

Undang-Undang No 51/Prp tahun 1960.....	149
Bab V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	153
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157



ABSTRAK

Judul Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Tanah Oleh Pemilik Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggunaan Tanah Tanpa Hak Atau Izin Yang Sah (Studi Kasus : Putusan Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg).

Tesis ini meneliti penegakan hukum terkait penggunaan tanah tanpa izin oleh pihak yang berhak atau penguasanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Kajian difokuskan pada Putusan Nomor 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg, di mana terdakwa yang sama sekali tidak pernah menjual tanahnya dihadapkan pada peralihan hak melalui notaris, sehingga sertifikat tanah tercatat atas nama pelapor. Pembelaan hukum terdakwa dalam persidangan berhasil membuat terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber hukum primer yang dianalisis meliputi KUHP, KUHPA, UUPA, dan PERPU Nomor 51 Tahun 1960. Analisis difokuskan pada penerapan unsur tindak pidana, proses penyidikan, pemeriksaan perkara tipiring dengan acara cepat, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum karena terdapat perbedaan interpretasi mengenai hubungan hukum perdata dan pidana dalam transaksi jual beli tanah yang menjadi dasar perkara. Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi tidak memenuhi unsur pidana karena hubungan hukum perdata masih berlaku, sehingga penyelesaian lebih tepat melalui jalur perdata. Temuan ini menekankan perlunya regulasi yang jelas dan kehati-hatian penyidik dalam menerapkan PERPU Nomor 51 Tahun 1960 agar sengketa tanah yang sejatinya bersifat perdata tidak berujung pada kriminalisasi.

Kata kunci: penegakan hukum, pemanfaatan tanah, PERPU 51/1960, tindak pidana ringan, Putusan 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg

ABSTRACT

Thesis Title: Criminal Law Enforcement on Land Utilization by Owners in Legal Conflict in the Crime of Unauthorized or Illegal Land Use (Case Study: Decision Number 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg)

This thesis examines the enforcement of law concerning the use of land without permission by the rightful owner or possessor, as regulated under the Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 51 of 1960. The study focuses on Decision Number 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg, in which the defendant, who had never sold the land, faced a transfer of rights through a notary, resulting in the land certificate being registered under the complainant's name. The defendant's legal defense in court successfully led to acquittal from all charges (ontslag van alle rechtsvervolging).

The research employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. Primary legal sources analyzed include the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHP), Basic Agrarian Law (UUPA), and PERPU Number 51 of 1960. The analysis focuses on the application of criminal elements, investigation processes, expedited minor criminal case procedures, and the judge's considerations in rendering the verdict.

The results indicate that law enforcement in this case does not fully reflect legal certainty due to differing interpretations regarding the relationship between civil and criminal law in land sale transactions underlying the case. The judge found the defendant's actions proven but not fulfilling the elements of a criminal offense, as the civil legal relationship remained valid, making resolution through civil mechanisms more appropriate. The findings underscore the need for clear regulations and caution by investigators in applying PERPU Number 51 of 1960 to prevent the criminalization of land disputes that are essentially civil in nature.

Keywords: law enforcement, land utilization, PERPU 51/1960, minor criminal offense, Decision 21/Pid.CR/2019/PN.Bdg